

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media.
- Agung, M. (2020). *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020*.
- Anti Corruption Clearing House. (2020). *Modul Materi TINDAK PIDANA KORUPSI*. 1–80. <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Shaleh, A. I. (2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 127–145.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.11006>
- Dwidjowijoto, R. N. (2003). Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 6, Issue 3, pp. 285–308).
- Energi, P. P. H. (2021). *Pemegang Saham PT. Pertamina Hulu Energi*.
Http://Phe.Pertamina.Com.
<http://phe.pertamina.com/ContentView.aspx?MenuID=kM9AXs68ThgdDyeANN9gsA==&TypeGroupContent=mELirpUhRYksFj7k8/XBcQ==&NewsCatID=9OYR9kUytIsLilKZieD5xg==>
- Gatot, S. (2016). *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata* (1st ed.). Rineka cIPTA.
- Hamzah, andi. (2012). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Harris, T. A. (2010). *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi*. Ghalia Indonesia.
- Hasri, H. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BUMN. *Danu Bagus Pratama*, 6.
- Isfardiyana, S. H. (2007). *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* , Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 A . Pendahuluan Perseroan terbatas (perseroan) adalah subjek hukum yang dak berjiwa dan ada karena diciptakan oleh man. 2(158), 168–191.
- Konstitusi, M. (2013a). *Putusan MK 62/PUU-XI/2013*. 62, 1–242.
- Konstitusi, M. (2013b). *Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013*. 6, 1–232.
- Lestari, S. N. (2015). Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi. *Notarius*, 6(2), 302–315.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/10261/8161>
- Novendra, B., & Syifa, A. M. (2020). Miskonsepsi Pembebaran Tanggung Jawab kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 26(4), 458. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.298>
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2019). *Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst*.
- Pengadilan Tinggi DKI. (2019). *Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI*.
- Prasetyo. (2014). *Dilema BUMN benturan penerapan Business Judgment - BJR*

- dalam keputusan bisnis Direksi BUMN.* Rayyana Komunikasindo.
- Pratiwi, I. A. (2003). Ketidaksinkronan Prinsip UU BUMN dengan UU PUPN Mengenai Piutang BUMN. *Jurnal*, 1–16.
- RI, U. (2003). *Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Ruslan, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Prenanda Group.
- Tjandra, W. R. (n.d.). *Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN*. Retrieved July 27, 2021, from <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>
- UU, R. (1999). *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- UU, R. (2003). *Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 1 Angka 1*.
- UU, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.